

Partisipasi Politik Paguyuban Kerukunan Keluarga Bima-Dompu Dalam Membangun Komunikasi Politik Lokal Di Kota Kupang

Idris
Universitas Muhammadiyah
Kupang
idris.ali.fisipol@gmail.com

Ambo
Universitas Muhammadiyah
Kupang

Nurdin
Universitas Muhammadiyah
Kupang

Abstract

This paper attempts to answer the question of how the political participation of the Bima-Dompu family harmony community in building local political communication in Kupang City. The research method used is a qualitative approach. This study concludes that the political participation of the Bima-Dompu Community at the time of the regional head election of Kupang City still tends to be based on one-stop instructions where the community leader determines their political attitude.

Keywords:

Communication, Local Politics, Bima

Abstrak

Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana partisipasi politik paguyuban kerukunan keluarga Bima-Dompu dalam membangun komunikasi politik lokal di Kota Kupang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa partisipasi politik Paguyuban Bima-Dompu pada saat pemilihan kepala daerah Kota Kupang masih cenderung berdasarkan instruksi satu pintu dimana pimpinan paguyuban yang menentukan sikap politiknya.

Kata Kunci: Komunikasi, Politik Lokal, Suku Bima

Pendahuluan

Tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada hakikatnya mencerminkan kaitan antara lembaga politik dan kekuatan –kekuatan sosial yang membentuknya. Kekuatan sosial ialah kelompok etnis, keagamaan, teritorial, ekonomis atau status. Pada dasarnya kekuatan-kekuatan sosial termasuk etnisitas memiliki kekuatan politik

yang menguat dari arus bawah dalam arti tergantung garis komando ketua kerukunan atau di tuakan dalam lembaga organisasi paguyuban tersebut. Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan anggota masyarakat acapkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pada keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam mencapai tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (David dalam Arifin, 2002;128). Menurut Huntington dalam Arifin (2002;128) partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, Ramlan Surbakti (1992;48), mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.

Dengan partisipasi politik kita mengacu pada semua aktivitas yang sah oleh semua ikatan Paguyuban Bima-Dompu yang berada di Kota Kupang untuk mempengaruhi pemilihan Pilkada dan pemilihan Legislatif atau tindakan-tindakan yang mereka ambil. Paguyuban Bima-Dompu sejak tahun 1975 didirikan di Kota Kupang peran aktif di peta politik lokal belum pernah karena terbentur dengan system pola demokrasi jaman orde baru yang lebih terorientasi pada kepentingan golongan tertentu yakni sejak masa kejayaan Golkar sebagai kemenangan tunggal. Organisasi sosial tidak memiliki tendensi politik yang kuat hanya organisasi sebagai basis Golkar di berikan kewenangan pada jaman orde baru misalnya KNPI, AMPI, KOSGORO, MKGR, organisasi sosial pendukung utama kemenangan Golkar. Dengan reformasi total yang dipelopori oleh Prof Dr. M. Amin Rais, MA, maka mulai bermunculan partai-partai baru ibaratkan jamur yang tumbuh di musim hujan. Bukan hanya partai politik yang memiliki kekuatan mendobrak panggung politik, kelompok kepentingan termasuk ikatan kesukuan, ormas-ormas dan OKP-OKP pun mempunyai basis politik lokal dalam membungun kotrak politik.

Rafael (2001,62) menuturkan bahwa Entitas cultural adalah suatu istilah yang mengacu pada unsur yang membentuk kebudayaan. Dengan kata lain; entitas cultural merupakan sintesis dari semua faktor cultural. Secara kasar, dapat dikatakan bahwa setiap kelompok sosial adalah entitas cultural. Pada dasarnya entitas cultural dibentuk oleh sejarah, lantas diperkuat oleh pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Kebudayaan sebagai perkembangan sejarah yang unik dari setiap bangsa atau kelompok bangsa-bangsa diwariskan melalui mekanisme pendidikan dalam arti luas. Maka tak mengherankan bila beberapa unsurnya

beroperasi secara fisik, tanpa banyak disadari. Tetapi banyak unsurnya beroperasi secara sadar melalui keyakinan kolektif, citra dan sikap yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan.

Bahwa faktor-faktor cultural mempunyai pengaruh terhadap kehidupan politik, itu dapat dilihat sejak Paguyuban Bima-Dompu memiliki legelitas hukum sebagai Paguyuban bernaung di payung hukum, eksistensi Paguyuban Bima-Dompu di wilayah politik lokal di Kota Kupang memiliki posisi tawar-menawar yang signifikan kekuasaan. Paguyuban Bima-Dompu berkiprah sebagai agen politik lokal telah berhasil membawa kepala daerah di atas kursi kekuasaan, hal ini ada partisipasi politik lokal Paguyuban Bima-Dompu Di Kota Kupang. Secara internal telah memiliki solidaritas kultural yakni ada komitmen politik sebagai nilai jual pada publik tentang entitas cultural. Pada level dukungan legislatif ada keberpihakan pada partai-partai yang selalu memberikan dukungan kepada organisasi Bima-Dompu hal ini merupakan bentuk tawaran pada wilayah sosial politik.

Eksistensi warga Bima Dompu di kancah politik lokal cukup membawa perubahan paradigma berpikir etnisitas, yakni secara populasi jumlah warga pemilih mutlak sebanyak 650 pemilih yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Kupang. Pada peta politik angka kuantitatif tidak bermakna apa-apa, namun yang memiliki nilai jual di areal politik yakni nama besar etnisitas atau paguyuban itu sendiri. Secara realita keterlibatan warga Bima-Dompu pada kancah politik lokal terutama dalam konteks person dapat mencair dan diterima oleh semua kalangan warga Bima-Dompu yang berada di Kota Kupang.

Paguyuban Bima –Dompu yang berada di Kota Kupang selalu mengikuti garis komando yang di bangun bersama, maka peneliti ingin melihat fenomena paguyuban Bima Dompu dalam partisipasi politik lokal dengan pendekatan secara teoritis berupa teori simbolik dan teori fungsional struktural. Pada umumnya orang Bima-Dompu tidak pernah membantah apa yang menjadi instruksi oleh seseorang yang di tuakan misalnya para sesepuh, ketua kerukunan dan figus-figur yang memiliki integritas pada kejayaan organisasi. Peneliti melihat keberadaan paguyuban Bima-Dompu dalam ajang politik lokal di Kota Kupang. Dari penjabaran pada latar belakang tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian yakni : Bagaimana Partisipasi Politik Paguyuban Kerukunan Keluarga Bima-Dompu Dalam Membangun Komunikasi Politik Lokal di Kota Kupang?. Untuk mendiskripsikan partisipasi politik Paguyuban Kerukunan Keluarga Bima Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik Paguyuban Kerukunan Keluarga Bima Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Kupang.

Tinjauan Teori

A. Konsep Sosialisasi Politik

Apter dalam Elvi (2007;79) mengatakan, bahwa salah satu behavioralter penting adalah sosialisasi, atau proses belajar bermasyarakat. Hess et all dalam Althoff (2003;25). Dalam bukunya *The Develpoment of Political Attitudes in Childr*, mengisyaratkan bahwa partisipasi politik juga mempengaruhi sosialisasi. Pengalaman mengambil tindakan politik, dari hal memberikan suara hingga mencalonkan diri, dibangun atas pola-pola sosialisasi awal dan memberikan kesempatan untuk proses belajar bermasyarakat baru.

Barger dalam Subakti,(1992:140) bukunya menyatakan bahwa partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi, asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tau tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.

Partisipasi menurut Oxford Leaner's Pockket dictiondry (1995 :299) dan Ramlah (Subakti 1992:140) keikutsertaan warga Negara, bisa menentukan segala keputusan yang mempengaruhi kehidupannya karena itu partisipasi politik adalah mewujudkan keikusteraan rakyat dalam kegiatan politik tidak tertitik pada fokus memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang taat pada hukum positif.

Sosialisasi politik Rush et oll (2003;25) dalam beberapa hal merupakan konsep kunci sosiologi politik, Pertama; ketiga konsep lain mengenai partisipasi, perekrutan dan komunikasi erat kaitan dengan sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik merupakan variabel-variabel dependen yang parsial dari sosialisasi dan komunikasi karena keduanya menyajikan elemen dinamis dalam sosialisasi, Kedua; sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interdependensi perilaku sosial dan perilaku politik, dan hasil sosialisasi politik yang maksimal tercermin dalam bentuk partisipasi politik sebenarnya diwujudkan perubahan perilaku politik.

Haedir Nasir, konspirasi-konspirasi politik makin terbuka dan cenderung menunjukkan gejala perilaku eksklusif yang lebih memetingkan kelompok sendiri dan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Pemerintah semakin kehilangan wibawa dan kepercayaan, baik karena stigma politik yang diciptakan maupun karena ulah para elit pemerintah sendiri yang sering salah dalam mengambil keputusan. Konspirasi politik bukan di bangun oleh elit-elit politik saja, kesukuan, agama merupakan pranata yang dapat melahirkan konspirasi politik yang efektif karena secara emosional cukup dekat dengan pendukung kegiatan politik. (1999;121).

B. Konsep Partisipasi Politik

Juliansyah (2007;82) menyatakan bahwa partisipasi politik yang lebih besar antara lain; (1) menciptakan perdamaian dan ketertiban, (2) pencerahan kepada masyarakat luas berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dalam bentuk diskusi-diskusi, (3) mengadakan seminar-seminar, (4) membayar pajak, (5) mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan formal dan informal, (6) memberikan kontribusi dalam bentuk penyampaian ide-ide, (7) pemikiran-pemikiran tentang ideology nasional, (8) memelihara hasil pembangunan, dan (9) bela Negara.

Rush et oll dalam Althoff (2003;23) mengemukakan partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan didalam system politik. Aktifitas politik itu bisa bergerak dari keterlibatan sampai dengan aktifitas jabatannya, rakyat dan masyarakat lainnya juga bisa bervariasi didalam mempelajari konsep-konsep mengenai apatik politik dan alienasi, serta peranan mereka dalam keterlibatan dan keterlibatan terbatas. Juga mendapatkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk didalam tingkatan paling atas dari partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam tipe jabatan dan tercakup didalamnya proses rekrutmen politik.

Menurut Surbakti (1992;141), rambu-rambu partisipasi politik sebagai berikut : Pertama; partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Kedua; kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Ketiga; kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Keempat; kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kelima; kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar.

Almond dalam Haryanto (1982:35), menyatakan bahwa fungsi-fungsi input dan output dapat dikelompokan sebagai berikut :Fungsi-fungsi input terdiri atas : (a) Sosialisasi politik dan rekrutmen, (b) Artikulasi Kepentingan, (c) Agregasi kepentingan, (d) Komunikasi politik. Fungsi-fungsi output terdiri atas : (a) Pembuatan peraturan, (b) penerapan peraturan, (c) ajudikasi peraturan.

C. Konsep Realitas Politik

Bismark dalam Susetyo (2004:29), menyatakan bahwa realitas politik lebih utama dari pada moralitas politik, kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan, dan pola pemikiran politik

yang dianut oleh banyak politisi nasional dan lokal dengan berusaha dengan manipulasi rakyat.

Apa yang di ungkapkan oleh Bismark akan menjadi benar bila esensi politik hanya mengejar kekuasaan semata, tetapi akan menjadi suatu bencana bagi terciptanya demokrasi bila kekuasaan politik sudah di peroleh yang berkaitan pada otoriter dalam menerapkan gaya kepemimpinan.

Eep Saifulloh (1999;3) menyatakan dalam setiap komunitas masyarakat berserak nilai dan beragam kepentingan politik. Ketika nilai dan kepentingan politik itu dirangkumkan dalam label “Negara”, keragaman tetap tak bisa dihapuskan. Dalam kerangka itulah para strukturalis semacam Dahrendorf sampai pada kepercayaan mereka bahwa sebuah struktur politik seyogyanya mengakomodasi perbedaan, konflik, dan oposisi. Dalam kerangka itu pula para subkultural semacam Dahl sampai pada teori mereka oposisi adalah subkultur demokrasi.

Parsons dalam Ronald (2003;299), menganggap budaya terdiri dari sistem-sistem dengan organisasi internalnya sendiri dengan demikian sistem-sistem budaya memiliki otonomi dalam tingkat tertentu, namun Parsons juga menekankan saling keterikatan antara budaya dengan sosial maupun dengan fenomena psikologis.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Kupang, di mana Etnis Bima secara umum lebih dominan berada di Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian kualitatif sebagaimana yang di katakan Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng 2002: 2-3) mendefinisikan “ metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) pendekatan kualitatif di arahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dalam penentuan informen pada penelitian kualitatif tidak perlu menentukan berapa banyak yang akan dijadikan informen, namun yang perlu diperhatikan adalah kedalaman menggali terhadap fenomena yang mau diangkat. Pada prinsipnya selalu menentukan kriteria yang dijadikan sebagai informen adalah warga Bima-Dompu yang terlibat langsung dalam politik praktis, pengurus partai, pengurus inti KKBD, para sesepuh dan mahasiswa. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik sebagai berikut : Observasi partisipasi, adalah keterlibatan langsung peneliti terhadap aktivitas warga Bima-

Dompu pada saat melakukan partisipasi politik pada ajang Pilkada Walikota kemarin berupa cerita pengalaman mereka selaku aktor politik lokal.

Hasil Penelitian

Diskusi politik yang dimaksud adalah upaya membangun komunikasi yang baik antara masyarakat Bima dan Dompu dengan publik figur yang ada untuk penyamaan persepsi tanpa adanya intervensi pada ranah pilihan politik warga Bima-Dompu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengejawentahan fungsi organisasi atau paguyuban dalam merangkul dan menyambung aspirasi masyarakat khususnya warga Bima-Dompu.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden memberikan tanggapan yang beragam, seperti halnya tanggapan salah satu responden Bapak Ihsan A. Gani yang mengatakan bahwa salah satu fungsi organisasi sebagai wadah silaturahmi warga asal Bima-Dompu sudah semestinya mengambil peran dalam membangun komunikasi dengan para kandidat yang kemudian melakukan sosialisasi kepada warga tanpa adanya intervensi terhadap hak politik atau pilihan politik anggotanya, peran-peran strategis seperti inilah yang dapat diperoleh untuk melihat makna pentingnya keberadaan suatu organisasi. Untuk menjaga eksistensi suatu organisasi nirlaba seperti Paguyuban KKBD, maka hubungan baik dengan berbagai pihak perlu dilakukan dalam koridor organisasi dan secara institusi sudah sepatutnya untuk menjaga komitmen dan konsistensi terhadap kesepakatan bersama tersebut, dan hal-hal semacam ini (diskusi politik) perlu terus dikembangkan atau bahkan dijadikan budaya dalam kehidupan organisasi Paguyuban KKBD untuk menjaga harmoni antar Warga, Pengurus dan Pejabat yang ada khususnya di Kota Kupang.

Dari beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya warga paguyuban KKBD dalam konteks politik lokal Kota Kupang memahami eksistensi organisasi dengan peran strategis yang mesti dijalankan untuk melanjutkan aspirasi anggotanya tapi tetap menghargai hak dan pilihan politik individu serta kesepakatan bersama dalam organisasi, dan sebagai warga negara yang baik anggota KKBD sudah sepatutnya memberikan kontribusi positif untuk kemaslahatan bersama dimanapun berada.

Dengan melihat uraian hasil wawancara di atas, warga KKBD menunjukkan peran yang beragam dalam kegiatan kampanye calon walikota dan wakil walikota, yang pada intinya memberikan kontribusi positif untuk mensukseskan PILKADA Langsung di Kota Kupang demi terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bermartabat serta terpilihnya Pemimpin yang disukai oleh banyak orang (suara terbanyak).

Hikmah atau manfaat dalam berorganisasi telah banyak dirasakan oleh warga KKBD baik dalam konteks sosial masyarakat dan silaturahmi antar sesama warga Bima-Dompu

maupun terbangunnya sebuah komunikasi yang harmonis dengan pejabat pemerintah serta terbukanya akses yang cukup luas bagi kepentingan bersama dalam organisasi. Oleh karenanya penentuan pilihan menjadi sangat penting untuk menentukan langkah dan akses organisasi dimasa mendatang. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tamrin M. Amin yang mengakui bahwa saat ini pamor KKBD sudah melambung jauh ke atas dan telah menjadi suatu kekuatan politik yang besar dan patut diperhitungkan dalam ranah politik lokal Kota Kupang. KKBD yang ada saat ini lebih dikenal oleh paguyuban-paguyuban lain yang ada di Kota Kupang dibanding dengan waktu sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, memberikan gambaran bahwa membentuk suatu komunitas sosial untuk kemaslahatan hidup bersama menjadi hal yang sangat penting, karena organisasi adalah kekuatan politik sehingga dengan adanya paguyuban sebagai wadah berkumpulnya warga asal Bima dan Dompu, KKBD semakin diperhitungkan dalam kancah politik lokal Kota Kupang. Dengan demikian, kelompok kepentingan yang ada akan melirik dan mengajak kerjasama dengan KKBD yang merupakan kekuatan politik, selain itu eksistensi KKBD sekaligus sebagai wahana sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas tentang karakteristik Bima dan Dompu dalam konteks khasanah kebudayaan nusantara.

Sebagai wadah berhimpun KKBD telah menjadi sebuah tempat silaturahmi untuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Bima – Dompu dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk membicarakan partisipasi politik masyarakat Bima –Dompu dalam mendukung pemilihan kepala daerah Kota Kupang 2017. KKBD sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki komunitas dari semua strata sosial memiliki informasi secara individu maupun secara kelompok dalam membangun komunikasi dengan berbagai unsur termasuk pejabat politik/administratif, secara lembaga paguyuban KKBD pada momentum politik pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang tahun 2017 oleh pejabat politik melihat paguyuban KKBD adalah sesuatu kekuatan politik yang patut diperhitungkan dalam memberikan dukungan, sehingga terbangun sebuah komunikasi baik secara individu maupun secara lembaga sehingga lahir kesepakatan-kesepakatan bagaimana membangun Kota Kupang kedepan, secara lembaga Paguyuban KKBD komitmen dalam memberikan dukungan politiknya terhadap pejabat politik yang telah membangun komunikasi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Bima-Dompu di Kota Kupang, bahwa partai politik atau pejabat politik yang didukung aspiratif dan dapat memenangkan pemilu.

Dari penjelasan atau hasil penelitian pada informen di atas, maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa komunikasi politik sebagai langkah awal untuk mengikat dua lembaga, politik lokal paguyuban sesungguhnya memiliki kredit poin dalam tawar menawar gending politik yang obyektif, selama antara elit politik dan organisasi paguyuban tidak

saling mencederai komitmen sesuatu yang wajar dan pantas dikembangkan kepada lembaga manapun. Oleh karena itu kerukunan KKBD suatu langkah maju dalam mengambil sikap politik praktis sebagai kedewaan pendidikan berpolitik di Indonesia.

Perilaku politik local sangat fariatif berdasarkan suku bangsa, idologi, agama, organisasi dan sebagainya sebagai wadah yang menyatukan aspirasi-aspirasi kelompok atau golongan tertentu. Di antara pengaruh-pengaruh kebiasaan dalam perilaku adalah simplikasi gerakan yang membuat perilaku lebih cermat dan berkurangnya rasa antipati pada elit politik. Selain itu, kebiasaan mengurangi keinginan akan mengalihkan perhatian pada peningkatan kesadaran. Dalam kemampuan untuk membentuk kebiasaan memperoleh sifat yang baru sangatlah mungkin. Adanya sifat baru melalui kebiasaan ini tidak hanya disadari oleh individu, tapi kebiasaan ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Kondisi partisipasi perilaku politik local masyarakat Bima-Dompu dalam perseptif symbol cukup berpengaruh terhadap keberadaan wadah paguyuban, paguyuban Bima sebagai symbol kekuatan bergending politik pada semua sector. Secara realita dapat diterima oleh semua unsure politik terutama dalam mengantar para kandidat calon walikota Kupang pada tahun 2018. Pada diiel politik harus komitmen pada ranah-ranah politik local yang diinginkan oleh paguyuban itu sendiri, misalnya menjanjikan falens balas jasa. Secara organisastoris paguyuban Bima-Dompu memiliki manajemen organisasi yang solid dari sekian paguyuban kesukuan yang ada di Nusa Tenggara Timur, dengan indikasi setiap kandidat calon walikota Bima cukup banyak melirik pada paguyuban Bima-Dompu, namun alhasil sangat tergantung pada top lider organisasi. Secara internal keorganisasian cukup mengandung makna symbol sebagai kesekapatan awal dalam membangun komitmen politik.

Sebagaimana dalam hasil temuan pada penelitian bahwa Kerukunan Paguyuban Bima-Dompu cukup antusius berpartisipasi berdasarkan instruksi dari pimpinan organisasi, dalam arti konteks symbol yang dianut oleh warga Bima-Dompu siapa pun yang berhasil merupakan kebanggan secara etnistias bukan persoalan persons, kondisi semacam ini terpola dalam symbol etnis Bima-Dompu. Dalam etnisitas salah satu sifat kesadaran yang aneh adalah sebuah fakta bahwa ia selalu menunjukkan beberapa tingkat yang meliputi kesadaran diri seseorang. Dalam hal ini muncul pendapat Parsons yang mengemukakan dua cara; sebagian sebagai known (diketahui) dan yang lainnya knower (yang mengetahui), yang satu obyek dan yang lainnya bertindak sebagai subyek. Pola semacam ini cukup realitas dalam paguyuban Bima-Dompu dalam setiap momentum even-even politik, sehingga eksistensi organisasi dapat berjalan sebagai obyek bagi elit-elit politik dalam membangun komunikasi politik.

Yang paling penting setelah unsure-unsur pokok dalam diri adalah perasaan dan emosi. Ini terbagi kepada dua macam; kepuasan dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Alasan untuk ini biasanya merupakan salah satu dari kondisi yang menggambarkan kesuksesan atau kegagalan, posisi bagus atau jelek sebuah pegangan di dunia. Orang dengan ego empiris dan kekuasaan yang luas memiliki keragaman untuk sukses jarang dihinggapi keraguan. Emosi dalam kepuasan diri dan kerendahan diri adalah jenis emosi yang primitif dalam pola berpikir politik. Emosi kesukaan terbangun secara produktif apabila top lider mampu membaca kebutuhan internal kejayaan paguyuban sebagai wadah yang menyatukan elit politik dengan kelompok-kelompok solidaritas pendukung.

Pada pespektif symbol yang diinginkan oleh paguyuban Bima-Dompu terhadap partisipasi secara aktif dalam ranah politik praktis terindikasi sejumlah hasrat-hasrat kebersamaan antara lain hasrat-hasrat mencari pengalaman baru terutama dalam pertualangan politik, hasrat untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan sebuah institusi paguyuban, hasrat untuk menguasai terutama impas politik berupa jabatan, status social atau indikasi-indikasi social lain, dan hasrat untuk hidup yang aman, semua manusia tentu sangat menginginkan hidup aman dan tentram, sehingga paguyuban Bima-Dompu dalam ranah politik tetap komitmen kepada persoalan kepentingan umum secara luas.

Struktur fungsionalisme menggambarkan reaksi sistematis para intelektual yang berorientasi pada establish terhadap masalah politik, terutama dalam kebutuhan suatu wadah organisasi sebagai payung berlindung pada ranah kontrak politik antara elit politik dengan top lider suatu organisasi. Secara fungsionalisme structural akan terpola dengan kondisi irama politik yang dibangun oleh elit-elit politik, maka konsekuensi harus mampu menjabarkan secara fungsionalis structural pula pada semua unsure yang terlibat dalam keputusan politik. Selanjutnya, struktur fungsionalisme, sebagai landasan teori kontemporer, menggambarkan penerapan paradigma organik pada kebutuhan sistematis paguyuban oleh seorang elit intelektual khusus termasuk pimpinan paguyuban.

Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai bentuk yang sistematis saling berhubungan, saling bergantung, berubah, keseluruhan yang berorientasi, dan menggambarkan kebutuhan-kebutuhan system atau fungsi yang mendasarinya. Dengan demikian, struktur atau system social menggambarkan fungsi atau kebutuhan-kebutuhan system tertentu yang mendasarinya. Kemudian, dibuat suatu usaha untuk mengembangkan teori umum yang didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat itu eksis dan memiliki realitas independent atau eksistensi sebagai suatu system social. Maka dalam konteks paguyuban Bima-Dompu terikat oleh suatu pola kebersamaan dalam mengambil sikap berpihak pada elit-elit politik tertentu. Berpolitik merupakan suatu hal yang mendasar dalam diri manusia sebagai insane intelektualitas, kondisi semacam ini tidak dapat dibatasi secara utuh atau

secara permanent oleh siapapun. Setiap individu merupakan kebebasan dalam berpolitik, organisasi atau wadah hanya sebagai media menghubungkan dalam berkomunikasi politik, sehingga hubungan secara fungsional structural antara pengurus fungsionaris paguyuban dengan anggota sebatas media sosialisasi pendidikan politik.

Kekuatan dalam internal paguyuban sebagai sarana penguatan terhadap elit politik di Kota Kupang dapat melirik semua wadah paguyuban sebagai basis, di mana pada saat proses pemilihan kepala daerah Kota Kupang dari semua paguyuban kesukuan sangat berperan aktif dalam menentukan sikap politiknya, sehingga antara teori fungsional structural dapat melihat fenomenologis politik yang berkembang di Kota Kupang.

Dari hasil paparan kedua teori tersebut di atas, untuk Kerukunan paguyuban Bima-Dompu dalam pendekatan teori simbolik dan fungsional structural cukup fariatif dan mampu membaca dalam perilaku politik local Bima- Dompu terhadap partisipasi politik pemilihan kepala Daerah Kota Kupang. Secara simbolik keberadaan kepastian pilihan politik masih kuat pada tradisi symbol dalam artian dimana yang dominant menguat, maka akan berkerucut terhadap salah seorang kandidat. Sedangkan pendekatan fungsional structural sangat tergantung kepada yang dituahkan dalam paguyuban itu sendiri, misalnya ketua paguyuban, para sesepuh dan senioritas seseorang.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan temuan teori tentang partisipasi politik paguyuban Bima-Dompu dalam politik local dalam pemilihan kepala daerah Kota kupang dapat menyimpulkan secara empiric dan teoritis dengan berbagai perspektif antara lain :Secara realita bahwa paguyuban Bima-Dompu partisipasi politik local terhadap pemilihan kepala daerah Kota Kupang masih cenderung berdasarkan instruksi satu pintu dalam artian ada aba-aba dari top lider dalam menentukan sikap politiknya. Han ini semua menunjukan hasil dari pada wawancara di lapangan. Paguyuban Bima-Dompu dalam menentukan sikap politik mengikuti irama kekuatan pada akar rumput sebagai penguatan politik. Pada perspoektif simbolik paguyuban Bima-Dompu sebagai cerminan dalam perilaku politik local khususnya pada proses pemilihan kepala daerah Kota Kupang. Pada perspektif fungsional structural di mana pola komunikasi politik local paguyuban Bima-Dompu ada pengaruh berdasarkan top lider dalam penentuan ranah politik praktis. Maka fungsi dan tugas ketua paguyuban masih memiliki kekuatan social terhadap semua keputusan yang berlaku. Dalam hasil karya ilmiah ini, penulis akan menyampaikan beberapa hal sebagai saran-saran yakni: Kepada elit politik dapat melihat bahwa wadah paguyuban sebagai asset politik yang cukup potensial untuk dikembangkan dan di bina untuk menahirkan kader-kader politik yang militant. Kepada ketua paguyuban Bima-Dompu dapat dijadikan sebagai referensi politik yang unggul wadah

organisasi. Partisipasi politik yang dibangun dalam ranah politik harus mengutamakan substansi kemaslahatan semua orang bukan kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1989, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia
- Budiardjo, Miriam dan Tri Nuke Pudjiastuti, 1996, Teori-Teori Politik Dewasa Ini. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Chilcote H. Ronald, 2003, Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Culla Adi Suryadi, 1999, Politik Indonesia Kontemporer Masyarakat Madani Pemikiran, teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Fatah Saefulloh Eep, 1999, Membangun Oposisi Agenda-Agenda Perubahan Politik Massa Depan. Penerbit. ROSDA.
- Gomang Syarifudin 2001, Sosiologi Politik Sebuah Perspektif Teoritis. Penerbit. Yayasan Swadhesi Kupang. NTT.
- Haryanto, 1982, Sistem Politik Suatu Pengantar. Yogyakarta. Penerbit Liberty
- Huntington P. Samuel, 2003, Tertib Politik Di tengah Pergeseran Kepentingan Massa. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Idris, 2004, Makna Ungkapan Tradisional Maja Labo Dahu Dalam Perilaku Etnis Bima Studi Sosiologis Tentang Kohesivitas Sosial Dalam Perspektif Simbolik Etnik Bima Di Kota Kupang, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Juiansyah Elvi, 2007, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah. Penerbit. CV. Mandar Maju.
- Liliweri Alo, Gatra- Gatra komunikasi antar budaya. Pustaka pelajar. Yogyakarta, 2001.
- , Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2003.
- , 2004 Prasangka Antar Etnik Dalam Masyarakat Multi Kultur. Fisip Undana Tidak diterbitkan.
- Maran Raga Rafael, 2001, Pengantar Sosiologi Politik. Penerbit. Rineka Cipta
- Mulyana Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, Rosdakarya Bandung. 2002
- Moleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2002
- Nasikum, 1989, Sistem Sosial Indonesia. Jakarta. CV. Rajawali
- Nashir Haedar, 1999, Pragmatisme Politik Kaum Elit, Pustaka Pelajar.
- Pudintia . Metodologi Kajian Tradisi Lisan, yayasan obor indonesia , 1998.
- Poloma .M. Margaret, sosiologi kotenporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- P. Huntington, Samuel, 2003, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan, Edisi Indonesia, diterjemahkan Sahat Simmora, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Rahman Arifin, 2002, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional. Penerbit. SIC

Rush, Michel dan Phillip Althoff, 2003, Pengantar Sosiologi Politik, Alih bahasa Kartini Kartono. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada

Sudikan Yuwana Setya, Metode Penelitian Kebudayaan, Citra Wacana, 2000

S. Takdir Alisyahbana. Antropologi Baru. PT Dian Rakyat. Jakarta. 1986